

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Semarang, Rabu (23 Juli 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) hari ini menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah antara pejabat lama **Ignasius Bambang Adiputranto, SH., M.Si.**, dengan pejabat baru **Dr. Cris Kuntadi, SE., MM., CPA., QIA., CA., Ak.** Acara ini disaksikan oleh Anggota V BPK **Dr. Agung Firman Sampurna, SE., MSi.**, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah **Dr. Heru H. Sudjatmoko, MSi.** dan didampingi oleh Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara BPK RI **Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak.**

Ignasius Bambang Adiputranto telah bertugas sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sejak 07 September 2010 s.d. 10 Juli 2014. Saat ini beliau menempati posisi baru sebagai Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Inspektorat Utama. Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah digantikan oleh Cris Kuntadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Acara dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB juga dihadiri oleh Formpimda Provinsi Jawa Tengah, Pembantu Rektor II UNNES, Para Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Aspidsus Kejati Jawa Tengah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kanwil dan Kabid PAPPK DJPbN Provinsi Jawa Tengah, Kadit Pemeriksaan (KP4) Kanwil DJP Jawa Tengah I, dan Deputi BI Wilayah V serta rekan-rekan media pers.

Dalam pidatonya, Anggota V BPK RI menyampaikan bahwa Konsolidasi organisasi di BPK, khususnya dalam *deployment policy* (kebijakan penempatan) atas pelaksana dan pejabat, baik struktural maupun fungsional dimaksudkan untuk antara lain menjaga independensinya. Agar senantiasa terdapat “jarak” antara pemeriksa (auditor) dan terperiksa (auditee), dimana pemeriksa tetap dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh entitas yang diperiksanya. Tentu saja ada tujuan-tujuan strategis yang lain yang akan dicapai dalam proses konsolidasi organisasi. Esensi dari konsolidasi organisasi, pada dasarnya adalah upaya organisasi untuk terus memperbaiki dan memperkuat dirinya. Oleh karena itu, selain menjaga independensi, juga ada muatan yang lain seperti *knowledge and experience sharing* (berbagi pengetahuan dan pengalaman), dimana melalui pejabat-pejabat yang ditempatkan disuatu unit kerja, dilakukan pengayaan atas pengalaman dan pengetahuan keseluruhan pelaksana yang terlibat di unit kerja tersebut. Yang kesemuanya itu telah melalui *human resources management system* sebagai bagian yang terintegrasi dalam *governance system* di BPK. Dengan demikian, mereka yang dipercaya untuk menempati satu jabatan tidak saja memenuhi syarat administrasi, tetapi juga telah mempertimbangkan secara cermat, integritas dan dinamika kontemporer atas kebutuhan kompetensi.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Telepon : 024-8660825,8660826.8660883 ext 1008; Fax : 024-8660884

Email : semarang@bpk.go.id